



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Nomor : B-4621/KP 00 02/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BAPETEN

Jakarta, 13 November 2025

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Gubernur

Di tempat

1. Rujukan

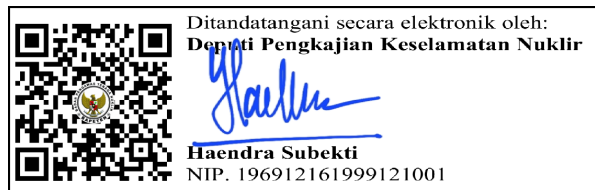
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 - h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
 - i. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - k. Surat Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor T-4330/KP 00 01/X/2025 dan Nomor T-4331/KP 00 01/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - l. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5979/B-AK.03/SD/K/2024 tanggal 10 September 2024, hal Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sebelum Penerapan Manajemen Talenta Secara Nasional;
 - m. Pengumuman Nomor 02/KP 00 02/PANSEL/XI/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah membuka pendaftaran seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya – Sekretaris Utama (pejabat eselon I/a) terhitung mulai tanggal 14 – 28 November 2025;
 - b. Ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam pengumuman terlampir dan juga di laman <https://www.bapeten.go.id/> dan <https://asnkarier.bkn.go.id/> .

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kerja sama Saudara/i untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i, yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Utama,



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi;
4. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Lampiran Surat

Nomor : B-4621/KP 00 02/XI/2025

Tanggal : 13 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KEMENTERIAN

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Pertahanan
10. Kementerian Agama
11. Kementerian Hukum
12. Kementerian Hak Asasi Manusia
13. Kementerian Keuangan
14. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
16. Kementerian Lingkungan Hidup
17. Kementerian Kesehatan
18. Kementerian Sosial
19. Kementerian Ketenagakerjaan
20. Kementerian Perindustrian
21. Kementerian Perdagangan
22. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Kementerian Pekerjaan Umum
24. Kementerian Perhubungan
25. Kementerian Komunikasi dan Digital
26. Kementerian Pertanian
27. Kementerian Kehutanan
28. Kementerian Kelautan dan Perikanan
29. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

32. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Nasional Penempatan Pekerja Migran Indonesia
33. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
34. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
35. Kementerian Kebudayaan
36. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
38. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
39. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41. Kementerian Pemuda dan Olahraga
42. Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA NON KEMENTERIAN

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
14. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
15. Badan Pusat Statistik (BPS)
16. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
17. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
18. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
19. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
20. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
21. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

22. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
23. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

LEMBAGA NON STRUKTURAL

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Komisi Yudisial Republik Indonesia
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
7. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
8. Kejaksaan Republik Indonesia
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Tentara Nasional Indonesia
11. Dewan Pertahanan Nasional
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
14. Komisi Pemilihan Umum
15. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
16. Komisi Pemberantasan Korupsi
17. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
18. Ombudsman Republik Indonesia
19. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
20. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
21. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
22. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
23. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

GUBERNUR PROVINSI

1. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Gubernur Sumatera Barat

4. Gubernur Riau
5. Gubernur Kepulauan Riau
6. Gubernur Sumatera Selatan
7. Gubernur Jambi
8. Gubernur Lampung
9. Gubernur Bengkulu
10. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
11. Gubernur DKI Jakarta
12. Gubernur Banten
13. Gubernur Jawa Barat
14. Gubernur Jawa Tengah
15. Gubernur D.I. Yogyakarta
16. Gubernur Jawa Timur
17. Gubernur Kalimantan Barat
18. Gubernur Kalimantan Selatan
19. Gubernur Kalimantan Tengah
20. Gubernur Kalimantan Timur
21. Gubernur Kalimantan Utara
22. Gubernur Sulawesi Utara
24. Gubernur Sulawesi Selatan
25. Gubernur Sulawesi Barat
26. Gubernur Sulawesi Tenggara
27. Gubernur Gorontalo
28. Gubernur Bali
29. Gubernur Nusa Tenggara Barat
30. Gubernur Nusa Tenggara Timur
31. Gubernur Maluku
32. Gubernur Maluku Utara
33. Gubernur Papua
34. Gubernur Papua Barat
35. Papua Barat Daya
36. Papua Tengah
37. Papua Pegunungan
38. Papua Selatan



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

PENGUMUMAN

NOMOR: 02/KP 00 02/PANSEL/XI/2025

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025 dengan ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dengan ketentuan sebagai berikut:

I. NAMA JABATAN

1. Sekretaris Utama BAPETEN (Eselon I.a)

Tugas Jabatan: Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

II. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM:

- 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- 4) Usia paling tinggi 57 tahun 6 bulan 0 hari pada saat pendaftaran;
- 5) Diutamakan memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

- 6) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- 8) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
- 9) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

B. PERSYARATAN KHUSUS:

- 1) Memiliki latar belakang pendidikan semua rumpun keilmuan;
- 2) Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang ketenaganukliran serta pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- 3) Mempunyai pengetahuan umum tentang teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Pangkat minimal Pembina Utama Madya Golongan Ruang IV/c;
- 5) Diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan/atau Tingkat II, dan /atau Diklat Penjenjangan Fungsional Tingkat Utama; dan
- 6) Semua unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

III. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal **14 November 2025** melalui website BAPETEN di <https://www.bapeten.go.id/> dan laman <https://asnkarier.bkn.go.id/> .
2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal **15 November 2025** dan ditutup pada tanggal **29 November 2025 pukul 12:00 WIB**.
3. Lamaran dilengkapi dengan *scan* dokumen asli sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;

- f. Ijazah terakhir;
 - g. Penilaian Kinerja ASN Tahun 2023 dan 2024;
 - h. Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, atau hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) di atas meterai Rp. 10.000,00;
 - j. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00;
 - k. Pakta Integritas ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,00;
 - l. Sertifikat mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan/atau Tingkat II dan/atau Diklat Penjenjangan Fungsional Tingkat Utama atau yang sederajat;
 - m. Tanda bukti penyerahan LHKAN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara) baik berupa LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara) dan/atau SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak tahun 2024;
 - n. Surat keterangan dokter yang menyatakan berbadan sehat dan bebas dari penggunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah, dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan terakhir dari batas waktu pendaftaran berakhir.
4. Panduan pendaftaran dan format dokumen sebagaimana angka 3 huruf a, b, h, i, j dan k dapat diunduh pada laman <https://asnkarier.bkn.go.id/> dan <https://bit.ly/selterBapeten> .
5. Semua dokumen persyaratan lamaran diunggah dalam format pdf maksimal kapasitas 5 MB per dokumen paling lambat tanggal **29 November 2025 pukul 12:00 WIB** pada laman <https://asnkarier.bkn.go.id/> .

IV. JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman	14 – 28 November 2025
2.	Pendaftaran	15 – 29 November 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	3 Desember 2025
4.	Uji Kompetensi Teknis (Penyusunan Makalah/Policy Brief dan Video)	9 – 10 Desember 2025
5.	Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Assessment Centre)	11 – 12 Desember 2025
6.	Uji Kompetensi Teknis (Presentasi dan Wawancara)	18 Desember 2025
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	23 Desember 2025

Catatan:

*) Jadwal seleksi dapat berubah sewaktu-waktu, peserta seleksi memantau jadwal melalui website BAPETEN <https://www.bapeten.go.id/> atau laman <https://asnkarier.bkn.go.id/>

V. KETENTUAN LAIN

1. Berkas pelamar yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Tahapan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur;
3. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
4. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir berhak membatalkan hasil;

6. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir bersifat final mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 November 2025
Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Badan Pengawas Tenaga Nuklir



HAENDRA SUBEKTI



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

**PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 05/KP 00 02/PANSEL/XII/2025**

1. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan **LOLOS** seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tercantum pada Lampiran pengumuman ini.
2. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan **TIDAK LOLOS** seleksi administrasi dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
3. Peserta yang lolos seleksi administrasi **WAJIB** mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya sesuai dengan jadwal berikut:

Kegiatan	Waktu	Tempat
Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (<i>Assessment Center</i>)	9 – 11 Desember 2025 Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB	Gedung CAT BKN Jl. Mayor Jendral Sutoyo 12 Cililitan, Jakarta Timur
Uji Kompetensi Teknis (Penyusunan Makalah/ <i>Policy Brief</i> dan Video)	12 Desember 2025 Pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB	Gedung B BAPETEN Jl. Gajah Mada 8 Jakarta
Uji Kompetensi Teknis (Presentasi dan Wawancara)	18 Desember 2025 Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB	Gedung B BAPETEN Jl. Gajah Mada 8 Jakarta

4. Setiap perkembangan informasi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ini disampaikan melalui website <http://www.bapeten.go.id/> dan laman <https://asnkarier.bkn.go.id>
5. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2025
Ketua Panitia Seleksi Terbuka,



HAENDRA SUBEKTI

Lampiran Pengumuman
Nomor : 05/KP 00 02/PANSEL/XII/2025
Tanggal : 03 Desember 2025

**DAFTAR PESERTA LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

No.	Nama (sesuai urutan abjad)	Instansi
1.	Achmad Bussamah, S.T., M.K.K.K.	BAPETEN
2.	Asep Saefulloh Hermawan, S.Si., M.T.	BAPETEN
3.	Indra Gunawan, S.H.	BAPETEN
4.	Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng.	BKN

Ketua Panitia Seleksi Terbuka,



HAENDRA SUBEKTI



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1418/M.SM.02.03/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pertimbangan Rekomendasi Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya Yang Lowong melalui Seleksi
Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga
Nuklir (BAPETEN)

08 Desember 2025

Yth.
Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir nomor: T-4330/KP 00 01/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Permohonan Pertimbangan Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Yang Lowong di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pertimbangan rekomendasi pengisian JPT Madya melalui Seleksi Terbuka untuk **jabatan Sekretaris Utama** di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
2. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap Jabatan Manajerial memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.
3. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan. Ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN. Dalam penjelasannya, pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka adalah rekrutmen dan promosi jabatan secara terbuka pada lingkup internal instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit.
4. Lebih lanjut, tahapan pengisian JPT Madya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4, serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka terhadap usulan pengisian JPT Madya untuk jabatan Sekretaris Utama yang lowong di lingkungan Badan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251125VYZU
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dapat dipertimbangkan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan pengisian JPT Madya untuk jabatan Sekretaris Utama di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagaimana angka 5, agar dikoordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251125VYZU
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**